Rendahnya Efektivitas Ekoturisme Sebagai Solusi Thailand Terhadap Masalah Pengungsi Etnis Karen

Lalu Abdul Fatah – 070710428

Program Studi S1 Hubungan Internasional, Universitas Airlangga

ABSTRACT

The unstable condition of Myanmar because of the dispute between military and Karen rebels has caused many of Karen people fled to Thailand in the late of 1980s and early 1990s. Basically Thailand is ready to host Karen people since Thailand is the member of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). However, until now, Thailand has not signed the 1951 Geneva Convention or the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees. To overcome the economic problems of Karen refugees, Thailand has developed ecotourism since late 1990s, but this policy did not give any satisfying outcome. Therefore, the writer try to answer the research question of why is ecotourism as one way to address the economic problems of Karen refugees have low effectiveness? By using qualitative analysis and explanatory method. The writer uses the concept of political and economic ineffectiveness and issue – linkage theory and find that the low effectiveness of eco – tourism is not solely due to political ineffectiveness, but also due to economic ineffectiveness.

Keywords: *Refugees, Economic Problems of Refugees, Ecotourism Policy, Political and Economical Ineffectiveness*

Kondisi di Myanmar yang tidak stabil karena ada sengketa antara militer dengan pemberontak Karen, menyebabkan banyak orang Karen yang mengungsi ke Thailand pada akhir 1980-an dan awal 1990-an. Thailand memang bersedia menjadi tuan rumah karena memang menjadi anggota United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Namun, hingga saat ini, Thailand belum juga menandatangani Konvensi 1951 Jenewa atau Protokol 1967 tentang kepengungsian. Thailand sejak akhir 1990-an memang mengembangkan ekoturisme sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah ekonomi pengungsi Karen. Namun, ternyata efektivitas ekoturisme ini rendah. Maka dari itu, peneliti mengajukan rumusan masalah: mengapa ekoturisme sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah ekonomi pengungsi Karen memiliki efektivitas rendah? Dengan menggunakan metode analisis eksplanatif kualitatif, dengan menggunakan konsep inefektivitas politis dan inefektivitas ekonomis serta teori issue-linkage, peneliti menemukan bahwa rendahnya efektivitas ekoturisme semata-mata bukan disebabkan oleh inefektivitas politis, tapi oleh inefektivitas ekonomis.

Kata Kunci: *Pengungsi, Masalah Ekonomi Pengungsi, Kebijakan Ekoturisme, Inefektivitas Politis, dan Inefektivitas Ekonomis*

Konflik antara tentara militer Myanmar dengan pemberontak etnis Karen telah mendorong warga Myanmar untuk mengungsi ke Thailand. Data yang dirilis oleh TBBC (2013) menunjukkan bahwa di sepanjang perbatasan sisi Thailand berdiri 9 kamp pengungsian resmi yang menampung 128.480 pengungsi dari Myanmar. Delapan puluh persen di antaranya adalah etnis Karen.

Pemerintah Thailand memberikan *prima facie* bagi para pengungsi asal Myanmar ini tanpa dikenakan denda (Lang, 2002). Thailand juga mengizinkan mereka tinggal sementara di kamp pengungsian (Bowles, 1998). Padahal, hingga saat ini Thailand belum juga menandatangani Konvensi Jenewa 1951 tentang status pengungsi. Mereka juga belum memiliki hukum yang khusus mengatur pengungsi dan penentuan status mereka. Hanya Undang-Undang Imigrasi 1979 yang mereka punyai.

Meski demikian, hak-hak para pengungsi Karen belum sepenuhnya terjamin. Pemerintah menerapkan regulasi yang membatasi, semisal: tidak boleh bercocok tanam; tidak boleh mendirikan bangunan permanen; tidak boleh terlibat dalam aktivitas ekonomi; tidak boleh keluar masuk kamp tanpa pas; serta harus meminimalisasi kerusakan lingkungan (Bowles, 1998; Brees, 2010; Oh, 2010). Kebijakan pembatasan hak-hak pengungsi ini bahkan dibungkus dengan persepsi ‘ancaman keamanan’ (Fratticcioli, 2011).

Regulasi ini memang sengaja diberlakukan untuk mengondisikan para pengungsi agar tidak betah di kamp pengungsian. Sebab, jika mereka betah, mereka akan makin membebani pemerintah Thailand. Sementara integrasi dalam masyarakat lokal ditentang karena adanya sejarah konflik antara Thailand dan Myanmar. Selain itu, repatriasi tidak mungkin dilakukan karena tidak ada jaminan perlindungan HAM oleh junta militer Myanmar. Begitu pula, pemindahan ke negara ketiga juga kian melamban akibat krisis finansial global juga ketakutan isu terorisme yang bersemayam di tengah populasi pengungsi.

Meski demikian, Thailand menerapkan standar ganda dalam penanganan pengungsi. Di satu sisi membatasi, namun sekaligus melihat peluang potensi pada keberadaan mereka, utamanya potensi keunikan budaya, kearifan ekologis tradisional, juga pedoman hidup

berkelanjutan (Kazuhiro, 2010). Khusunya, keberadaan orang-orang Kayan yang terkenal dengan sebutan '*long-necked women*'.

Alasan itulah yang mendorong beberapa LSM lokal mulai mengenalkan ekoturisme pada 1990-an pada para pengungsi. Pemerintah Thailand pun ikut terlibat dalam ekoturisme ini pada 1995-1996 lewat *Toursim Authority of Thailand*. Setahun sebelumnya, yakni 1994-1995, ekoturisme dioperasikan di Thailand dengan istilah '*Kanthongthiao Choeng Anurak*' yang berarti wisata konservasi.

Pada 1997, Thailand membentuk Dewan Ekoturisme Nasional (*National Ecotourism Councils*) yang merupakan gabungan perwakilan dari masyarakat, akademisi, swasta, dan LSM. Dewan ini berfungsi untuk mengawasi perkembangan *National Ecotourism Policy and Action Plan* (NEPA) sekaligus menetapkan subkomite pada beragam aspek manajemen ekoturisme. Pada 1998, ekoturisme ini berubah nama dalam bahasa Thiland menjadi '*Kanthongthiao Choeng Niwet*' yang berati wisata ekologis.

Thailand menyadari bahwa ekoturisme bisa menjadi sumber pencaharian bagi masyarakat di pedesaan juga bisa menghasilkan manajemen sumber daya alam yang berkesinambungan. Menurut TISTR (1997), ada tiga kekuatan yang mendorong pada ekoturisme, yakni: permintaan akan konservasi lingkungan dan sumber daya alam; kebutuhan untuk pembangunan manusia berbasis partisipasi akar rumput; dan permintaan pasar wisatawan untuk pengalaman edukasi yang berbasis lingkungan.

Pada 2001, parlemen menyetujui NEPA untuk disahkan. Namun, rencana aksi yang terdiri dari 14 sub-rencana dan 37 proyek implementasi itu tidak pernah benar-benar dijalankan dalam satu paket utuh. Ini dikarenakan kebijakan dan prosedur anggaran yang mengalami perubahan. Hampir semua pemangku kepentingan kesulitan mengakses dukungan finansial untuk mengerjakan tugas mereka.

Adapun pemangku kepentingan yang terlibat dalam ekoturisme, mulai dari instansi pemerintah, LSM, perusahaan swasta, dan orang lokal. TAT dan lembaga pemerintah lainnya, seperti Departemen Pengembangan Masyarakat, Divisi Kesejahteraan *Hill Tribe*, Departemen Kesejahteraan Rakyat, Departemen Penyuluhan Pertanian, serta banyak institusi akademik lainnya telah dipromosikan ke berbagai desa. Warga pun dilatih untuk melayani di destinasi wisata. Penduduk desa menyediakan tempat-tempat atraksi dan pelayanan dasar untuk wisatawan. Sementara itu, Taman Nasional, Departemen Tanaman dan Margasatwa, Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan telah

merencanakan bahwa semua destinasi di kawasan hutan lindung menjadi tujuan ekoturisme.

Banyak operator dan pemilik penginapan yang mempromosikan ekowisata di program tur mereka dengan memastikan keterlibatan masyarakat lokal untuk menghargai wisatawan. LSM juga mendorong masyarakat untuk menjadikan ekoturisme sebagai sarana kontrol praktis atas pengembangan komunitas mereka, bukan sekadar untuk menanggapi kekuatan eksternal seperti yang mereka lakukan di masa lalu.

Namun, semua pihak, termasuk masyarakat lokal memiliki sedikit pengalaman dalam mengelola bentuk dan tujuan wisata yang berbeda-beda. Hal ini menciptakan kebingungan dalam pelaksanaannya dengan praktik yang jauh berbeda dan hasil yang muncul beberapa tahun terakhir ini.

Maka, pertanyaan yang muncul adalah mengapa ekoturisme sebagai sebuah kebijakan yang didesain sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah ekonomi pengungsi Karen memiliki efektivitas rendah?

Ekoturisme: Cara Halus Integrasi Lokal Pengungsi Karen

UNHCR pada Mei 2003 merumuskan *Framework for Durable Solutions for Refugees and Persons of Concern*. Kerangka kerja ini berisi acuan solusi penanganan pengungsi yang efektif dan dapat diandalkan yang terdiri atas: DAR (*Development Assistance for Refugees*); 4Rs (*Repatriation, Reintegration, Rehabilitation, Reconstruction*); dan DLI (*Development through Local Integration*).

Salah satu kriteria keberhasilan program tersebut adalah kemandirian (*self-reliance*). Kendati masalah pengungsi bisa diselesaikan melalui langkah-langkah politis seperti repatriasi atau dialihmukimkan ke negara ketiga, namun tidak semua pengungsi memilihnya. Maka, mendapatkan rumah di negara suaka dan berintegrasi dalam komunitas lokalnya mampu menawarkan solusi untuk jangka panjang. Ini agar para pengungsi tidak selamanya bergantung pada bantuan. Ini juga cara untuk berbagi beban bagi negara yang menampung banyak pengungsi (UNHCR, 2003).

Sentra keberhasilan strategi ini terletak pada sikap pemerintah tuan rumah dan otoritas lokal. DLI atau pembangunan melalui integrasi lokal ini kemudian menjadi sebuah pilihan dan bukan kewajiban bagi negara pemberi suaka. Hal yang sama pentingnya bagi keberhasilan strategi

DLI adalah komitmen dari komunitas pendonor untuk menyediakan asistensi tambahan.

UNHCR menjabarkan tiga komponen utama yang menjadi kunci untuk mengukur keberhasilan integrasi lokal. Salah satunya, komponen ekonomi. Efektivitas integrasi lokal dilihat melalui tiga variabel, yakni: berkurangnya ketergantungan pengungsi secara progresif pada bantuan negara atau bantuan kemanusiaan, tingkat kemandirian yang terus bertumbuh, dan kemampuan untuk mencapai mata pencaharian yang berkelanjutan.

Dalam teori, integrasi lokal tidak selalu diterima oleh pemerintah pemberi suaka, namun pada praktiknya otoritas di daerah mengakui secara *de facto* integrasi pengungsi ini. Sebagai contoh, untuk mencapai program integrasi lokal, otoritas di Sierra Leone lebih memilih menggunakan istilah '*self reliance strategy*' (Fielden, 2008). Ini bisa jadi menyiasati pengaruh politik dan persepsi publik terhadap kebijakan dan praktek suaka terhadap pengungsi.

Jika dicermati, apa yang dilakukan oleh Sierra Leone juga ditempuh oleh Thailand. Alih-alih menolak secara terang-terangan integrasi etnis Karen ke dalam masyarakat lokal, Thailand memilih menggunakan strategi ekoturisme. Ini cara yang lebih halus alias politis daripada secara terbuka menamakan kebijakannya dengan label 'integrasi lokal'. Selain tentu saja karena etnis Karen ini memiliki daya tarik bagi wisatawan sehingga bisa mendatangkan devisa bagi Thailand, yang pada akhirnya bisa digunakan pula untuk proses pemulihan kondisi pengungsi baik secara ekonomi, sosial budaya, juga politik.

Ketika etnis Karen diberikan akses untuk dikunjungi oleh wisatawan, maka mereka pun berpeluang untuk menunjukkan budaya mereka sekaligus mengembangkan keterampilan yang mereka miliki di bidang pembuatan cendera mata, menenun, dan atraksi budaya lainnya. Selain itu, lewat wisata *trekking* yang merupakan bagian dari ekoturisme, orang-orang Karen punya lahan untuk menghidupi diri mereka secara ekonomi, yakni dengan menjadi *porter*, pemandu, juga bahkan menyediakan akomodasi bagi turis, dari dalam dalam negeri maupun mancanegara.

Hal ini disebut juga efektivitas ekonomis karena sifat kebijakan ekoturisme yang implementatif, non-partisan, profesional, pragmatis, dan teknokratis. Itu tercermin dari aksi-aksi turunan dari kebijakan ekoturisme yang dilakukan oleh pemerintah, LSM, perusahan swasta, juga para individu di lapangan.

Jika merujuk pada pemikiran yang dikemukakan oleh Lubis dan Martani (1987), mereka membagi kriteria pengukuran efektivitas dalam tiga pendekatan, yakni: pendekatan sumber (*resource approach*), yakni mengukur efektivitas dari input; pendekatan proses (*process approach*), untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme pemerintahan, dan pendekatan sasaran (*goal approach*), yang mana pusat perhatiannya pada hasil, mengukur keberhasilan pemerintah untuk mencapai hasil yang sesuai rencana. Maka, dalam hal ini efektivitas ekonomis lebih pada pendekatan sasaran (*goal approach*).

Berbeda dengan efektivitas politis yang menggunakan pendekatan sumber. Karena pada pendekatan ini, lebih melihat pada proses pembuatan kebijakan dengan sumber-sumber rumusan kebijakan yang berasal dari tarik-ulur kepentingan dan sifatnya kompromistis, ideologis, dan partisan.Dalam implementasi ekoturisme, para pengungsi secara tidak langsung dididik untuk mandiri memenuhi kebutuhan hidup dan tidak terlalu bergantung pada bantuan negara dan bantuan kemanusiaan dari komunitas internasional. Orang-orang Karen ini juga punya kesempatan untuk berinteraksi dengan masyarakat Thailand dan masyarakat internasional. Di situ, mereka bisa menunjukkan eksistensi identitas mereka. Mereka juga secara tidak langsung mendapatkan hak untuk bergerak – dengan menjadi pemandu wisata, misalnya. Begitu pula hak untuk memiliki properti, yakni dengan membangun fasilitas akomodasi bagi para pengunjung.

Itu adalah cara ideal yang seharusnya bisa dicapai dalam mengatasi masalah ekonomi pengungsi etnis Karen. Namun, kenyataan di lapangan membuktikan sebaliknya. Penerapan integrasi lokal yang dibungkus dengan kebijakan ekoturisme, yang diterapkan oleh pemerintah Thailand pada pengungsi etnis Karen, memiliki efektivitas yang rendah.

Meski demikian, cara-cara di atas sebagaimana diungkapkan oleh Betts dan Loescher (2008) memang sangat politis. Ini bisa dilihat dari sifatnya yang ideologis, polisional, representatif, ada tarik-ulur kepentingan, dan kompromistis. Semua karakteristik itu tampak pada misalnya, keputusan untuk bagaimana mempertimbangkan hak warga negara dan non-warga negara. Ketika negara memutuskan menyediakan bantuan pada pengungsi, mereka mau tak mau harus mengalokasikan sumber daya langka pada non-warga negara. Mereka mungkin menemukan solusi untuk pengungsi dengan kontribusi finansial melalui organisasi kemanusiaan. Namun, kontribusi finansial ini biasanya sangat selektif dan jarang sekali dimotivasi oleh kepedulian humanis atau altruistis. Untuk itu, perlu dipahami tingkat motif politik yang mendasari kontribusi selektif negara pada pengungsi.

Cara-cara politis ini memang berhasil di tataran kebijakan dengan desain dan rencana aksi yang tersusun matang. Namun, dalam implementasinya, tidak sesuai dengan sasaran yang ditetapkan alias mengalami inefektivitas ekonomis.

Inefektivitas Politis vs Inefektivitas Ekonomis

Dalam proses pembuatan kebijakan ekoturisme in, tentu saja melibatkan banyak kepentingan. LSM lokal memiliki kepentingan untuk menyuarakan isu lingkungan titipan dari negara-negara Barat yang membiayai kelangsungan LSM tersebut. Dengan memanfaatkan kearifan lokal yang dimiliki oleh suku-suku bukit (*hill tribes*) Karen, dicetuskanlah isu ekoturisme. Ini selaras dengan kepentingan masyarakat agar tradisi luhur dan pengetahuan lokal mereka tetap terjaga dari modernitas yang cenderung destruktif, tidak hanya dari sisi lingkungan, tapi juga pemikiran.

Sementara itu, para pebisnis di industri wisata juga melihat peluang yang besar dari keberadaan hutan, pegunungan, serta keunikan para pengungsi Karen yang menempati wilayah itu. Ini tentu saja menjanjikan profit. Mereka tidak hanya bisa menjual paket-paket wisata alam tapi juga wisata budaya. Apalagi target pasarnya rata-rata adalah wisatawan mancanegara yang tertarik dengan wisata petualangan dan dengan sesuatu yang dibungkus dengan label 'eksotis' (Shripnomya, 2002).

Pemerintah Thailand pun demikian. Mereka memiliki kepentingan yang besar dengan mengangkat isu ekoturisme. Apalagi sejak 1982, wisata telah menyumbang pendapatan yang besar bagi Thailand. Ekoturisme dihadirkan bukan sekadar menjadi wisata alternatif dari wisata massal yang banyak dikritik karena mendestruksi lingkungan, tapi sekaligus penambah pundi-pundi devisa negara.

Selain itu, dalam memahami kebijakan ekoturism yang dijalankan pemerintah Thailand di daerah yang berbatasan teritorial dengan Myanmar dan kebetulan juga konsentrasi suku Karen (Myanmar) bermukim, pemerintah Thailand berperan sebagai pembuat kebijakan yang dapat mewakili kepentingan semua pihak. Di level domestik, pemerintah harus dapat melindungi warga sipil Thailand yang berbatasan dengan area tempat hidup warga Karen, para pengusaha lokal Thailand di wilayah tersebut, dan *stakeholders* lain dalam proses pengembangan usaha pariwisata. Pembuat kebijakan juga harus

memastikan mendapat dukungan dari masyarakat dan koalisi pemerintahannya.

Terkait kepentingan di level domestik ini, pemerintah pusat (Thailand) ingin mencapai berbagai hal sekaligus melalui ekoturisme di wilayah tersebut. Pertama, memastikan bahwa warga sipil setempat (di sisi teritorial Thailand) mendapat kepastian keamanan. Keamanan ini dicapai dengan tidak timbulnya tumpang-tindih (*spill-over*) pengungsi Karen hingga memasuki wilayah teritorial Thailand terlalu jauh. Keamanan juga bisa direalisasikan dengan tidak timbulnya tumpang-tindih yang sama dalam hal aktivitas tentara Myanmar untuk bertindak brutal di perbatasan Thailand-Myanmar dalam menyikapi keberadaan suku Karen. Di mana suku Karen justru 'terlihat' terberdayakan melalui ekoturisme yang dijalankan pemerintah Thailand sehingga tidak bisa menjadi alasan bagi tentara Myanmar melakukan tindakan represif di sekitar perbatasan Thialnd-Myanmar yang rentan melanggar kedaulatan Thailand.

Kedua, pemerintah pusat Thailand berupaya membangun citra bahwa ekoturisme di wilayah tersebut membuktikan bahwa kondisi di perbatasan layak secara bisnis. Bisa jadi hal ini berkaca dari pengalaman dalam hal Pattani di mana pemerintah Thailand belum kunjung menemui solusi bagaimana benar-benar berdamai dengan masyarakat muslim di Thailand Selatan. Melalui pendekatan nonmiliteristik berupa ekoturisme (sekalipun kasus Thailand Selatan tidak sama persis dengan suku Karen yang pada dasarnya terhitung warga Myanmar), Thailand membangun citra pada sesama negara tetangga Asia Tenggara lainnya (tidak semata Myanmar) bahwa Thailand mampu mengelola perbatasannya melalui pengembangan *local genius* Suku Karen dalam garis besar bernama ekoturisme.

Dalam level internasional, pemerintah Thailand harus dapat merepresentasikan berbagai aspek dari dalam negeri tadi sehingga diharapkan dapat menarik minat wisatawan asing untuk berkunjung. Hal ini sesuai yang diterapkan suatu negara terkait kebijakan pariwisatanya, yakni perlunya mempertimbangkan kesiapan elemen pemangku kepentingan dan sekaligus promosi wisata di luar negeri. Keduanya harus seimbang, di mana salah satu dari kebijakan tersebut tidak boleh dimaksimalkan dan yang lain diabaikan, sehingga pariwisata negara tersebut dapat berkembang secara maksimal.

Dari sini bisa dilihat bagaimana kebijakan *inbound tourism* Thailand harus dapat mengatur kondisi domestik dan hubungan luar negerinya agar seimbang. Dengan bermain di kedua level tersebut diharapkan kepentingan bisa tercapai, yaitu meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke negaranya. Dalam pembuatan kebjiakan domestik, suatu

negara harus membuat peraturan yang mempermudah wisatawan mendapatkan akses ke destinasi pariwisata. Sedangkan dalam level internasional, pemerintah melakukan promosi di luar negeri mengenai potensi-potensi pariwisata di negaranya.

Hal ini mempresentasikan bagaimana kerumitan aksesibilitas perbatasan yang menjadi masalah umum seperti halnya perbatasan-perbatasan rawan konflik di seluruh dunia, justru dilihat sebagai peluang ekoturisme bagi Thailand. Di mana melalui ekoturisme di area tempat bermukim suku Karen, pemerintah Thailand menjelaskan bagaimana posisi hukum keberadaan suku Karen di tengah perbatasan Thailand-Myanmar. Thailand juga bisa memperlihatkan sisi manusiawi dengan tetap memberdayakan hak penghidupan ekonomi etnis Karen (terutama orang-orang Kayan alias "*long-necked women*") bahwa etnis Karen berhak mendapat kehidupan ekonomi yang layak dan tidak sebatas berhenti sebagai pengungsi. Thailand juga bisa menerjemahkan kebutuhan para turis itu sendiri dalam hal aksesibilitas ke wilayah tersebut karena adanya payung kebijakan menyeluruh yang dilingkupi dengan ekoturisme. Itulah pendekatan politis dari kebijakan ekoturisme Thailand.

Adapun untuk mengetahui hasil dari implementasi kebijakan ekoturisme, digunakan pendekatan sasaran. Ini pendekatan yang ekonomis karena dicirikan sebagai hal yang implementatif, non-partisan, profesional, pragmatis, dan teknokratis. Di atas kertas, kebijakan ekoturisme Thailand memang telah mencakup hal-hal ideal yang hendak dicapai. Namun, dalam implementasinya tidak menggembirakan. Thailand, misalnya, mendapatkan pinjaman 1,25 juta dolar AS dari Jepang untuk mengubah Wat Chaan, kawasan terpencil yang ditinggali oleh orang Karen, menjadi 'destinasi ekoturisme' (MARP, 2014). Namun, para pemuda Wan Chaat dan beberapa LSM lokal berusaha untuk menghentikan implementasi rencana tersebut karena dikhawatirkan akan merusak kultur lokal dan lingkungan sekaligus.

Pemerintah memandang rencananya tersebut sebagai contoh ekoturisme yang baik. Namun, kritik terlontak bahwa kata 'ekoturisme' cuma kedok bagi pemerintah untuk mendapat investasi luar negeri dengan merusak taman nasional. Sebagaimana dikatakan oleh Chayant Pholpoke, akademisi di Chiang Mai University (Kakuchi, 1998). Adam Flinn dari jasa wisata Green Tours menyatakan bahwa masalahnya terletak pada hilangnya definisi dari ekoturisme itu sendiri (Kakuchi, 1998). Bahwa, istilah ini rentan dieksploitasi oleh operatur tur dengan membangun proyek yang destruktif.

Pada 2006 di Mae Hong Son, Thailand, ratusan orang-orang '*long-neck*' yang tinggal di tiga desa hendak dijadikan satu permukiman pengungsi oleh pemerintah (Chinadaily, 2006). Mereka akan dieksploitasi sebagai bagian dari atraksi untuk para wisatawan. Para wisatawan berpose di samping para perempuan ber'leher jerapah' tersebut. Hal ini memunculkan protes dengan pemakaian istilah '*human zoo*'.

Hal yang lebih memiriskan lagi adalah eksploitasi terhadap komunitas suku termarjinalkan di pegunungan bagian utara Thailand ini telah berlangsung sejak lama. Sebagaimana diungkapkan oleh Senator Kraisak Choonhavan bahwa orang-orang Thailand tidak sensitif pada kaum minoritas dengan menjadikan mereka sebagai pengeruk uang (Chinadaily, 2006).

Apalagi ekoturisme ini diwacanakan sebagai strategi halus untuk mengintegrasikan pengungsi dengan masyarakat Thailand. Namun, nyatanya tidak ada kemajuan dalam hal itu. Mereka tetap terkungkung di kamp-kamp pengungsian, tidak ada kebebasan untuk melakukan perjalanan keluar apalagi bekerja di luar kamp. Dengan alasan cagar budaya, para pengungsi Karen tetap tinggal di kamp. Memang mereka tidak memungkiri bahwa kekayaan budaya mereka mampu menarik pundi-pundi dolar dari para turis. Kendati semua kamp pengungsian ditutup bagi orang luar, namun turis bisa masuk dengan membayar antara 250 hingga 500 baht (sekitar 13,30 dolar AS) per masuk di desa. Namun, para perempuan yang menjadi atraktor wisata hanya mendapatkan sebagian kecil dari itu, kurang lebih 1.500 baht per bulan. Itu pun mereka harus menambah penghasilan dengan menjual pernak-pernik dan kartu pos.

Hal yang sama terjadi di Nai Soi Village. Lansiran dari *The Age* – media Australia pada 2008, turis masuk ke sana membayar 250 baht untuk memotret, berbicara pada perempuan berleher panjang, atau sekadar melihat-lihat. Perempuan yang memakai 'cincin' di leher mereka itu dibayar 1500 baht per bulan sebagai modal menjalankan lapak suvenir mereka. Sementara laki-laki menerima upah beras senilai 260 baht per bulan. Mereka dapat sedikit tambahan dari kain tradisional yang mereka tenun dan jual pada pengunjung. Laporan dari Asia Sentinel juga menunjukkan hal yang lebih miris lagi. Beberapa pebisnis malah mengambil beberapa orang Karen untuk ditempatkan di desa palsu di Chiang Rai dan Chiang Mai. Para turis yang berkunjung ke desa palsu ini harus membayar tiket masuk sebesar 1.000 baht.

Pada tataran politis, idealnya kebijakan ekoturisme di Thailand bisa menjadi wisata alternatif yang tepat agar lingkungan tetap terjaga. Namun, pada praktiknya, kebutuhan pada investasi luar negeri memengaruhi kebijakan dan rencana pembangunan wisata di hampir

semua negara. Akibatnya, muncullah dependensi. Dan, memang dari sudut pandang profit amat menguntungkan. Thailand yang merupakan *leader* dalam pembangunan ekoturisme di Kawasan Mekong (Leksakundilok, 2004) mendapat supervisi dari program bantuan luar negeri. Ini menjadikan ekoturisme sebagai bentuk mayoritas pembangunan wisata di sana dengan tujuan untuk menghindari dampak negatif dari wisata massal. Namun, pengembangan ini bertolak belakang dengan tujuan wisata itu sendiri, yakni untuk menghasilkan valas untuk pembangunan dalam negeri.

Kebocoran ekonomi pun terjadi. Ini faktual. Operator tur yang dijalankan oleh orang Thailand-lah yang diuntungkan. Dependensi pun terjadi, tapi sebagai hal yang sengaja dikondisikan. Padahal kalau bisa memilih, tentu saja mereka ingin menjadi orang Karen yang menjalankan hidup sesuai dengan tradisi dan nilai-nilai lokal yang mereka anut.

Idealnya paket wisata ekoturisme hanya terdiri dari wisatawan dalam kelompok kecil saja. Namun, dalam banyak kasus, kontrol dan monitoring jumlah pengunjung ini menjadi hal yang sulit. Akibarnya, 'ekoturisme' yang tidak diinginkan pun terjadi. Kendatipun banyak pengelola ekoturisme yang mendukung gagasan mengenai partisipasi lokal atau keuntungan lokal, namun pada praktinya operator tur, perencana profesional, juga akademisi malah lebih fokus pada peraihan keuntungan. Sehingga beberapa orang mengatakan bahwa ekoturisme tak ubahnya bentuk imperialisme baru terhadap lingkungan, yang dilakukan oleh negara-negara dunia pertama atas negara-negara dunia ketiga (Leksakundilok, 2004).

Sehingga, peneliti tidak memercayai bahwa ekoturisme bisa berkontribusi bagi distribusi pendapatan wisata yang lebih adil serta mengentaskan kemiskinan. Ekoturisme yang dijalankan Thailand malah tak berbeda dengan wisata konvensioanl yang kerap mengganggu dan mendistorsi struktur ekonomi lokal. Sebab, ekoturisme pun tidak bisa dipisahkan dari industri perjalanan dan wisata massal. Sehingga, menurut peneliti, konsep ideal ekoturisme Thailand yang berada di tataran politis ternyata tidak sesuai dengan implementasi di lapangan yang berada di tataran ekonomis. Etika manajemen adalah salah satu faktor utama bagi keberhasilan atau kesuksesan ekoturisme. Jadi, rendahnya efektivitas ekoturisme di Thailand lebih karena inefektivitas ekonomis daripada inefektivitas politis.

Kesimpulan

Ekoturisme Thailand yang merupakan bentuk halus dari strategi integrasi lokal, untuk membantu para pengungsi etnis Karen mengatasi masalah ekonominya, ternyata memiliki tingkat efektivitas yang rendah. Inefektivitas ini bukan pada tataran ideal atau politisnya, yakni berupa kebijakan ekoturisme. Tapi, inefektivitas ini terletak pada tataran implementasi.

Ekoturisme memang menawarkan manfaat dalam mendukung komunitas lokal sekaligus menjaga kelestarian hutan. Orang lokal pun terberdayakan – malah pada kasus tertentu cenderung eksploitatif – sementara negara memperoleh valas. Namun, investasi yang dilakukan oleh pihak luar yang tidak memiliki kepedulian pada orang lokal atau sumber daya setempat; membuat orang-orang lokal tidak bisa berkompetisi dengan mereka. Mereka juga tak bisa mengontrol permintaan industri wisata. Cara hidup mereka pun kian didominasi oleh kekuatan dari luar. Tanah yang subur dan seharusnya bisa diolah pun pelan-pelan hilang digantikan oleh kawasan ekoturisme. Orang-orang pun dipaksa untuk tetap berdiam di kamp pengungsian atau terpaksa menjadi buruh migran yang rentan eksploitasi, demi bertahan hidup.

Pariwisata di Thailand menciptakan ketergantungan pada pihak luar, alih-alih menguatkan otonomi lokal. Jadi, kian terlihat bahwa sebenarnya ekoturisme hanyalah kedok pemerintah Thailand untuk merenggut hak-hak etnis minoritas untuk tinggal di kawasan pegunungan yang berdampingan dengan taman nasional, cagar alam, dan kawasan lindung lainnya. Dari sini bisa dilihat bahwa pemerintah Thailand memainkan peran ambigu dalam mempromosikan wisata negara mereka. Mereka mencari dukungan profesional dan pebisnis untuk membenarkan tindakan mereka yang berseberangan dengan sensitivitas kultural dan ekologis.

Daftar Pustaka

Betts, A. & Loescher, G. 2008. Refugees in International Relations. dalam: Betts, A. & Loescher, G, eds. 2008. *Refugees in International Relations*. London: Oxford University Press.

Bowles, Edith, 1998. *From Village to Camp: Refugee Camp Life in Transition on the Thailand-Burma Border*. http://www.fmreview.org/FMRpdfs/FMR02/fmr203.pdf. Diakses pada 3 Oktober 2013.

Brees, Inge, 2010. *Burden or Boon: The Impact of Burmese Refugees on Thailand*. The Whitehead Journal of Diplomacy and International Relations, Vol. 11, No. 1.

ChinaDaily, 2006. *Long-neck refugees get Thai "human zoo" treatment*. Diakses dari http://www.chinadaily.com.cn/world/2006-09/18/content_691542.htm pada 22 Desember 2014.

Fielden, Alexandra. 2008. *Local Integration: An Under-Reported Solution to Protracted Refugee Situations*. New Issues in Refugee Research, research paper no. 158. UNHCR: Geneva.

Fratticcioli, Alessio, 2011. *Karen Refugees in Thailand*. Tersedia di Academia.edu.http://www.academia.edu/953434/Karen_Refugees_in_Thailand. Diakses pada 3 Oktober 2013.

Kakuchi, Suvendrini. 1998. *Development Thailand: Locals Say Ecotourism is Destruction*. Diakses dari http://www.ipsnews.net/1998/11/development-thailand-locals-say-ecotourism-is-destruction/ pada 22 Desember 2014.

Kazuhiro, Sunaga, 2010. *Ecotourism as an Indigenous Movement: Strategic Self-Representation of the Karen People in Northern Thailand*. Soka: Dokkyo University.

Lang, H. J., 2002. *Fear and Sanctuary: Burmese Refugees in Thailand*. [E-book] Ithaca, N.Y.: Southeast Asia Program Publications. http://books.google.com. Diakses pada 6 Oktober 2013.

Leksakundilok, Anucha. 2004. *Ecotourism and Community-based Ecotourism in the Mekong Region*. Working Paper Series no.10. February 20014. Australian Mekong Resource Center: University of Sydney.

Lubis, Hari S.B. dan Martani Huseini. 1987. *Teori Organisasi*. Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: Universitas Indonesia.

MARP (Minorities at Risk Project). 2014. *Chronology for Northern Hill Tribes in Thailand*. Diakses dari http://www.refworld.org/docid/469f38e8c.html pada 22 Desember 2014.

Oh, Su-Ann, 2010. *Education in Refugee Camps in Thailand: Policy, Practice, and Paucity*. Bangkok: UNESCO.

Salam, Usmar Drs., 2011. *Kuliah Pariwisata dalam Hubungan Internasional*. 24 Februari 2011. Yogyakarta: Universita Gajah Mada.

Sriphnomya, Eurblarp, 2002. *Ecotourism Policy in Thailand* dalam *Linking Green Productivity to Ecotourism: Experiences in the Asia-Pacific Region*. Brisbane: University of Queensland Printery. Hal. 236-241.

TBBC (Thailand Burma Border Consortium), 2013. *The Border Consortium: Programme Report January – June 2013*.

http://theborderconsortium.org/resources/2013-6-mth-rpt-jan-jun.zip. Diakses pada 4 Oktober 2013.

UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees), 1951. *Convention and Protocol Relationg to the Status of Refugees*. http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.html. Diakses pada 9 November 2013.